

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Tata Kelola keuangan perusahaan (GCG) yang Baik adalah seperangkat prinsip, aturan, dan mekanisme yang dirancang untuk mengelola serta mengendalikan secara etis, transparan, dan bertanggung jawab. Tujuan utama GCG adalah untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan cara yang memaksimalkan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) serta memastikan keberlanjutan dalam jangka panjang. Pengelolaan perusahaan yang baik merupakan pendekatan untuk mengatur, mengendalikan, dan menjalankan perusahaan secara efektif, efisien, serta berorientasi pada keberlanjutan. Pengelolaan yang baik memastikan bahwa perusahaan dapat mencapai tujuan strategisnya, menjaga reputasi yang positif, dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya.

Secara umum Good Corporate Governance (GCG) lebih ditujukan untuk sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, GCG lebih ditujukan pada tindakan yang dilakukan eksekutif perusahaan agar tidak merugikan para stakeholder karena GCG menyangkut moralitas, etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Terdapat beberapa pemahaman tentang definisi GCG yang dikeluarkan beberapa pihak baik dalam perspektif yang sempit dan perspektif yang luas. sedangkan Good Government Governance (GGG) atau Tata Kelola Pemerintahan yang Baik adalah prinsip dan praktik untuk menjalankan pemerintahan secara transparan, efektif, akuntabel, serta bertanggung jawab. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa pelayanan publik diberikan dengan kualitas terbaik, serta memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka mendukung terwujudnya *Good Government Governance* pada penyelenggaraan otonomi daerah, perlu diselenggarakan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan pokok yang telah ditetapkan dalam undang-undang. instansi pemerintahan menjadi objek yang pokok dalam rangka mewujudkan yang demikian. pada dasarnya, setiap aspirasi terutama berkaitan dengan materi ataupun keuangan maka akan menjadi sangat pokok dalam pelaksanaan *Good Government Governance* itu sendiri. setiap apapun yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, adalah wajib hukumnya untuk dipatuhi dan dibuktikan berdasarkan landasan hukum yang berlaku. maka

dari itu perlu perlu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas serta manajerial dalam melaksanakan dan mewujudkan *Good Government Governance*. pemerintah memerlukan sistem yang dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara baik yang meliputi informasi posisi keuangan, kondisi kinerja keuangan, dan akuntabilitas pemerintah.

Secara umum, GCG dan GGG memiliki prinsip-prinsip tata kelola yang serupa, perbedaan utama terletak pada fokus mereka, yaitu dimana GCG diarahkan untuk kepentingan bisnis dan profitabilitas perusahaan, sedangkan GGG berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan keefektifan tata kelola pemerintahan. Hal ini ditujukan pada meminimalisir kecurangan-kecurangan (fraud accounting) seperti memanipulasi laporan keuangan untuk menampilkan kondisi keuangan yang lebih baik atau lebih buruk dari keadaan sebenarnya, melibatkan penyalahgunaan atau pencurian aset perusahaan, seperti kas, inventaris, atau peralatan perusahaan, manipulasi atau penghilangan kewajiban untuk membuat perusahaan terlihat lebih menguntungkan atau lebih sedikit berhutang seperti yang sering terjadi pada umumnya seperti demikian.

Dengan prinsip keterbukaan dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran negara atau daerah merupakan wujud dari ketransparansian anggaran. Dalam konteks pemerintahan, transparansi penganggaran bertujuan untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya publik dilakukan dengan cara yang akuntabel, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Prinsip ini mencakup penyediaan informasi yang jelas, mudah diakses, dan dapat dipahami oleh publik mengenai proses penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Pentingnya transparansi dalam penganggaran tidak hanya berkaitan dengan aspek pengelolaan keuangan yang lebih baik, tetapi juga dengan upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, salah satu elemen kunci untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat adalah keterbukaan informasi.

Melalui transparansi penganggaran, masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana publik digunakan dan apakah pengelolaannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance (pemerintahan yang baik). Transparansi penganggaran memberikan berbagai manfaat, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Bagi pemerintah, transparansi membantu dalam meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran. Hal ini juga berkontribusi pada pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan tepat sasaran. Sedangkan bagi masyarakat, transparansi membuka ruang bagi partisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan

dengan alokasi anggaran, sehingga mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap kebijakan publik.

Namun, meskipun transparansi penganggaran dianggap sebagai alat penting dalam menciptakan pemerintahan yang baik, tantangan tetap ada dalam penerapannya. Beberapa tantangan utama yang sering dihadapi termasuk keterbatasan kapasitas pemerintah dalam menyediakan informasi yang cukup, kesulitan dalam menyajikan data anggaran dalam bentuk yang mudah dipahami oleh masyarakat awam, dan perlawanan dari pihak-pihak yang mungkin merasa terancam dengan keterbukaan informasi. Dengan demikian, transparansi penganggaran bukan hanya masalah teknis atau administrasi semata, tetapi juga menyangkut aspek politis dan sosial. Oleh karena itu, untuk mencapai transparansi yang efektif, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pihak, termasuk lembaga legislatif, eksekutif, dan masyarakat.

Upaya untuk terus meningkatkan transparansi penganggaran harus dipandang sebagai bagian integral dari reformasi pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Penelitian ini berjudul "Analisis Transparansi Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Budaya Kerja untuk Meminimalisir Kecurangan: Perspektif Teori Fraud Hexagon" penelitian ini mengangkat isu penting dalam pengelolaan anggaran sektor publik atau keuangan pemerintahan daerah, yaitu mengenai transparansi laporan anggaran dan upaya untuk meminimalkan semua jenis kecurangan yang dapat terjadi. Penelitian ini menganalisis bagaimana budaya kerja yang baik dapat meningkatkan transparansi pada laporan realisasi anggaran, dengan menggunakan Teori Fraud Hexagon sebagai kerangka analisis untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan dalam laporan realisasi anggaran yang pada sektor publik.

Pada dasarnya pemerintah Kecamatan Megang Sakti melakukan pencatatan dan pelaporan keuangannya menggunakan metode pencatatan cash basis dikarenakan lebih mudah dipahami, sederhana namun tidak lazim bagi kebanyakan orang, relatif mudah dimanipulasi, hanya informasi terkait kas, hanya menyediakan informasi dasar tidak menyediakan informasi non-keuangan, dan keterbatasannya pengukuran keberlanjutan kebijakan sesuai dengan perspektif budaya kerja yang diterapkan. Tentu hal ini menjadi alasan bagi peneliti dalam pengembangan teoritis dikarenakan terdapat perbandingan terbalik pada amanat Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor

22/PMK.05/2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mana kedua regulasi tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah menggunakan pencatatan akrual basis.

Wilayah kerja Camat Kecamatan Megang Sakti sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, yang mana bertindak sebagai pelaksana teknis kewilayahan dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kecamatan yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Menurut Setio Sapto Nugroho (2012:2), bahwa dalam lingkungan Akuntansi Pemerintahan memiliki ciri-ciri penting pada lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Untuk mewujudkan akuntabilitas, manajerial dan transparansi khususnya pada Laporan Realisasi Anggaran, penulis berusaha untuk melakukan penelitiannya terutama berkaitan dengan transparansi Laporan Realisasi Anggaran berbasis budaya kerja untuk meminimalisir kecurangan. Dalam menunjang informasi keuangannya, SKPD Kecamatan Megang Sakti menyajikan Laporan Keuangan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Megang Sakti. Berdasarkan hasil survei peneliti, pada dasarnya pemerintah Kecamatan Megang Sakti telah menyajikan laporan keuangannya hanya saja budaya kerja yang mereka terapkan dalam kesehariannya menjadi penyebab terjadinya kecurangan dalam penyusunan dan pelaporan keuangan itu sendiri. Sehingga terdapat beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian yaitu dalam perspektif meminimalisir kecurangan dalam penyajian laporan keuangannya.

Budaya kerja yang baik merupakan faktor penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif, harmonis, dan berkelanjutan. Budaya ini tidak hanya terkait dengan perilaku individu, tetapi juga mencakup nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang diterapkan oleh seluruh organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Budaya kerja yang baik dapat memperkuat hubungan antar rekan kerja, meningkatkan semangat kerja, serta mempercepat pencapaian tujuan perusahaan atau organisasi. Dengan komunikasi yang baik, kolaborasi yang kuat, etika kerja yang tinggi, dan kesejahteraan karyawan yang diperhatikan, organisasi dapat mencapai tujuan bersama secara lebih efektif. Membentuk budaya kerja yang baik membutuhkan komitmen dari seluruh elemen

organisasi, mulai dari pimpinan hingga karyawan, dan menjadi fondasi untuk pencapaian jangka panjang yang berkelanjutan.

Hingganya tindakan manipulasi, menyembunyian, atau pemalsuan informasi keuangan dalam laporan keuangan yang bertujuan untuk menipu pihak lain, seperti investor, kreditor, auditor, atau pemangku kepentingan lainnya. Kecurangan dalam akuntansi seringkali dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, menghindari kewajiban pajak, atau memanipulasi hasil keuangan perusahaan untuk tujuan tertentu, seperti meningkatkan nilai saham atau memperoleh pembiayaan yang lebih murah dapat diminimalisir dengan baik dan tindakan ilegal yang dapat merusak reputasi, keuangan, dan kelangsungan hidup sebuah organisasi. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memiliki sistem pengendalian yang baik dan budaya yang mendukung transparansi dan integritas dalam laporan keuangan. Pencegahan kecurangan melalui audit yang baik, kebijakan internal yang jelas, serta pelatihan yang berkelanjutan adalah kunci untuk meminimalkan risiko fraud accounting dan menjaga kredibilitas perusahaan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Megang Sakti berbasis Budaya Kerja ?
2. Bagaimana optimalisasi Laporan Realisasi Anggaran untuk meminimalisir terjadinya kecurangan ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam Penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Megang Sakti berbasis Budaya Kerja serta untuk mengetahui tingkat optimalisasi Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Megang Sakti.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan Tesis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

### a. Kantor Camat Kecamatan Megang Sakti

Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai seberapa transparan laporan anggaran yang ada. Dengan demikian, masyarakat dan pihak-pihak terkait dapat lebih mudah mengakses dan memantau penggunaan anggaran, sehingga dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan dana atau kecurangan.

### b. Akademisi

Penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang transparansi anggaran, akuntabilitas publik, dan manajemen keuangan di tingkat pemerintahan lokal. Hasil penelitian bisa menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut mengenai pengelolaan anggaran daerah, terutama dalam konteks pencegahan kecurangan.

### c. Masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya transparansi dalam